

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1.1. Pembangunan Manusia

Kesejahteraan sosial adalah sistem suatu bangsa yang berkaitan dengan manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut (Whithaker dan Federico, 1997). Seseorang atau masyarakat yang mempunyai kekurangan dalam perihal keahlian atau kemampuan diduga akan mempengaruhi dalam hal tingkat kesejahteraannya yang lebih rendah, kurangnya keahlian atau kemampuan dapat mengartikan bahwa kurang mampunya seseorang atau masyarakat untuk mencapai fungsi atau tujuan tertentu sehingga tingkat kesejahteraannya lebih rendah. Sedangkan berbeda dengan seseorang atau masyarakat yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang diduga dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, tingginya seseorang atau masyarakat dalam hal kemampuan dapat berarti mampu untuk mencapai fungsi atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh kesejahteraan yang lebih tinggi.

Dalam laporan pembangunan manusia cenderung fokus pada berbagai fungsi utama. Sementara cakupannya tetap harus dibatasi oleh keterbatasan data, tujuan utamanya adalah untuk memasukkan semua fungsi penting yang menjadi pusat

kualitas hidup, bervariasi dari fungsi yang dasar seperti menghindari morbiditas yang dapat dihindari dan kematian yang dapat dicegah untuk dipelajari, memiliki kehidupan yang nyaman, mencapai harga diri dan rasa hormat dari orang lain, terintegrasi secara sosial, dan sebagainya. Sejalan dengan pentingnya kebebasan dalam menilai manfaat yang dinikmati oleh orang dewasa, penting dalam konteks ini, untuk menghargai tidak hanya fungsi aktual orang saja, tetapi dengan kemampuan mereka untuk mencapai suatu fungsi yang mereka punya alasan memilih. (Anand dan Sen 2000).

Selain itu, dalam pembangunan manusia faktor kesehatan dan faktor pendidikan bukan hanya sekedar dalam hal input fungsi produksi saja melainkan juga dalam hal tujuan pembangunan yang bersifat fundamental. Peningkatan dalam sektor kesehatan dan sektor pendidikan akan membantu masyarakat supaya keluar dari zona atau jebakan lingkaran setan kemiskinan. Sekelompok orang yang berpendidikan akan dapat memberi manfaat kepada masyarakat disekelilingnya, seperti menciptakan berbagai inovasi yang berguna bagi komunitasnya. (Todaro, M.P, Smith S.C 2006).

Setelah dijelaskan mengenai pembangunan manusia dan beberapa faktor dalam pembangunan manusia supaya dapat tercapai tujuannya, perlu diketahui bahwa ada empat hal penting yang harus diperhatikan yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan (UNDP 1995). Empat hal pokok tersebut memuat pijakan-pijakan yang dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. Produktivitas, kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktifitas dan berperan penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. sehingga pembangunan ekonomi juga dapat digolongkan dalam bagian pembangunan manusia.
2. Pemerataan, dalam hal mendapatkan kesempatan dan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan social, penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam hal tersebut. Oleh karena itu kegiatan yang dapat meminimalisir kesempatan untuk mendapatkan akses tersebut harus diperhatikan, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dan kesempatan yang ada dan ikut berperan dalam kegiatann produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Kestinambungan, akses terhadap sumber daya ekonomi dan social harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga disiapkan untuk generasi yang akan datang. Segala bentuk sumber daya baik fisik, manusia maupun lingkungan harus senantiasa diperbarui.
4. Pemberdayaan, dalam hal keputusan dan proses yang akan menentukan arah kehidupan mereka, penduduk harus turut berpartisipasi dan berperan penuh. Begitu pula dalam hal mengambil manfaat dari proses pembangunan penduduk juga harus dilibatkan.

Model pembangunan manusia sebenarnya tidak berhenti pada keempat hal tersebut diatas. Terdapat beberapa alternatif tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat seperti ekonomi dan social, politik sampai kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai

dengan drajat pribadi dan jasmani hak-hak azasi manusia merupakan bagian dari model tersebut.

1.2. Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Ukuran dalam suatu pembangunan yang digunakan selama ini rata-rata dengan menggunakan PDB dalam situasi nasional dan PDRB dalam situasi regional, hanya mampu menggambarkan pembangunan ekonomi saja. Oleh sebab itu untuk mengukur suatu pembangunan yang lebih menyeluruh dibutuhkan suatu parameter yang mampu menggambarkan perkembangan dari aspek sosial dan kesejahteraan manusia tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Suryana 2000).

United Nations Development Programe (UNDP) mulai pada tahun 1990 telah mengukur suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan beberapa faktor, diantaranya adalah seperti faktor rata-rata usia harapan hidup, faktor rata-rata lama sekolah, faktor angka melek huruf, dan faktor kesejahteraan secara keseluruhan. Laporan ini menganggap bahwa dalam pembangunan manusia pada hakekatnya yaitu suatu proses memperbesar pilihan-pilihan manusia. Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan sebutan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Todaro dalam penelitiannya (Hasan 2016) *Human Development Index* (HDI) merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur

tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah. Indikator HDI jauh melebihi pertumbuhan konvensional. Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Namun dalam pertumbuhan ekonomi bukan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan merupakan salah satu alat saja, yang terpenting yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai perbaikan kapabilitas manusianya dan bagaimana cara manusia dalam menggunakan kapabilitasnya tersebut.

Sementara itu, menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) untuk mengetahui tingkat indeks pembangunan suatu daerah dapat di deskripsikan dengan beberapa faktor, yaitu seperti umur panjang dan sehat yang ditinjau dari segi kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah untuk mengukur kinerja dalam pembangunan dari segi pendidikan; dan kemampuan masyarakat dalam membeli sejumlah kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang ditinjau dalam segi rata-rata besarnya pengeluaran perkapita. Nilai dari indeks tersebut berkisar antara 0-100. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirilis oleh UNDP menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia.

Menurut *Human Development Report* (UNESCO, 2007) dijelaskan bahwa *Human Development Index* (HDI) adalah suatu konstruksi pengukuran atas dasar konsep “*right based approach to human development*”. HDI melakukan pengukuran rata-rata dalam pencapaian setiap individu di suatu negara yang menyangkut atas tiga dasar dimensi dari proses pengembangan kualitas sumber

daya manusia. Dalam pengukuran ini dilakukan dengan cara menetapkan beberapa asumsi dasar bahwa manusia yang berkualitas adalah sebagai berikut :

- a) Manusia yang dapat hidup sehat dan panjang umur, sebagaimana diukur dengan Angka Harapan Hidup sejak waktu lahir (life expectancy at birth).
- b) Manusia yang memiliki kecakapan dan pendidikan yang diperlukan bagi hidupnya, sebagaimana diukur melalui indikator angka literasi orang dewasa (adult literacy rate) dengan bobot penilaian dua pertiga, serta indikator kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan bobot penilaian satu pertiga dari penghitungan indeks pendidikan.
- c) Manusia yang dapat mencapai standar hidup layak, sebagaimana diukur dengan logaritma pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita yang menggunakan indikator purchasing power parity (PPP) yang dihitung dalam dolar Amerika.

1.3. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Adapun cara menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 (X_1 + X_2 + X_3) \dots \dots \dots (1)$$

Dimana bahwa :

X_1 : Indeks Harapan Hidup

X_2 : Indeks Pendidikan

X_3 : Indeks Kesehatan

Selain cara menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM), adapun cara menghitung komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

- Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

- Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

- Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

1.4. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

- 1) Indeks Harapan Hidup

Indeks harapan hidup menunjukkan banyaknya tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati oleh penduduk di suatu wilayah dengan menggunakan angka kematian dan kelahiran per tahun yang akan memperlihatkan tingkat hidup sehat dan rata-rata lama hidup. Karena terdapat kesulitan dalam memperoleh data orang yang meninggal dalam kurun waktu tertentu, maka digunakan metode tidak langsung dalam menghitung angka harapan hidup. Data yang digunakan dalam metode ini adalah rata-rata anak masih hidup dari wanita yang pernah kawin dan rata-rata anak lahir hidup (BPS, 2009).

2) Indeks Pendidikan

Rata-rata lama sekolah/ *Mean Years Of Schooling Index*(MYS) dan angka melek huruf / *Adult Literacy Rate Index*(Lit) adalah dua indikator pada perhitungan indeks pendidikan. Kedua indikator tersebut diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit) yang merupakan komponen masyarakat yang mampu baca tulis dalam kelompok masyarakat keseluruhan (BPS, 2009)

3) Indeks Hidup Layak

Indeks hidup layak merupakan gambaran daya beli masyarakat. Menurut UNDP *real per capita GDP adjusted* / PDB riil per kapita yang disesuaikan merupakan indikator yang digunakan dalam menghitung standar hidup layak (daya beli), akan tetapi dalam perhitungan IPM se-nasional (kabupaten/kota dan provinsi) tidak menggunakan PDRB perkapita dikarenakan hanya mengukur produksi suatu wilayah. Sedangkan di Indonesia dalam mengukur standar hidup

layak masyarakat BPS menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Masyarakat yakni data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih yang dominan dikonsumsi masyarakat Indonesia yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*) (BPS, 2009).

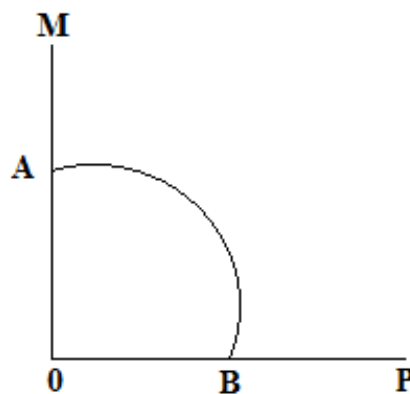
2. Ketimpangan Pendapatan dan Gini Ratio

Pengertian umum pendapatan diartikan sebagai hasil pencarian usaha atau hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi (Boediono 1992). Adapun konsep pendapatan yang dikemukakan oleh (Wild, 2003 : 311), *“economic income is typically measured as cash flow plus the change in the fair value of net assets. Under this definition, income includes both realized (cash flow) and unrealized (holding gain or loss) components”*. Menurut Wild, pendapatan secara khusus diukur sebagai aliran kas yang ditambah dengan perubahan di dalam nilai bersih aktiva. Wild juga memasukkan pendapatan yang dapat direalisasi sebagai komponen dari pendapatan.

Namun disetiap penerimaan pendapatan terdapat beberapa permasalahan salah satunya yaitu dengan adanya ketimpangan pendapatan yang dapat menyebabkan adanya suatu ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kondisi ketimpangan pendapatan juga menyebabkan terjadinya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya alam dan faktor produksi terutama dalam kepemilikan modal. Suatu wilayah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap terciptanya pola pembangunan ekonomi, ketidaksamaan dalam suatu wilayah ini berpengaruh terhadap

kemampuan suatu wilayah untuk berkembang yang dapat mengakibatkan beberapa wilayah dapat berkembang dengan cepat dan adapun beberapa wilayah lainnya yang berkembang dengan lambat. Kemampuan kedua wilayah terjadi ini dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan baik dalam pendapatan maupun pembangunan yang terjadi di Indonesia.

Menurut (Todaro, M.P, Smith S.C 2006), pendekatan yang sederhana dalam masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan memakai kerangka kemungkinan produksi. Untuk melukiskan permasalahannya, produksi dalam suatu daerah atau negara dibedakan menjadi dua kelompok barang, yaitu barang kebutuhan pokok (makanan, minuman, pakaian dan perumahan) serta yang kedua barang mewah. Dengan asumsi semua faktor produksi telah dimanfaatkan secara penuh, maka permasalahan yang muncul adalah bagaimana menentukan kombinasi barang yang akan diproduksi dan bagaimana masyarakat menurut pilihannya. Dalam gambar 2.2 berikut ini memberikan gambaran mengenai masalah ini yaitu sebagai berikut :



Sumber : (Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga 2000)

Gambar 2. 1
Kurva Kemungkinan Produksi

Sumbu vertikal menunjukkan jumlah produksi barang mewah, sementara sumbu horizontal menunjukkan jumlah produksi barang kebutuhan pokok. Kurva kemungkinan produksi merupakan tempat kedudukan titik-titik kombinasi kedua barang yang diproduksi secara maksimum. Titik A dan B memberikan gambaran tentang kombinasi produksi antara barang mewah dengan barang kebutuhan pokok dalam tingkat pendapatan yang sama besar. Pada titik A lebih banyak barang mewah yang diproduksi bila dibandingkan dengan kebutuhan pokok. Sebaliknya pada titik B lebih sedikit barang mewah dihasilkan untuk masyarakat dibandingkan dengan barang kebutuhan pokok.

Selain itu, alat ukur yang sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan yaitu dengan Indeks Gini (*Gini Ratio*). Menurut Daimon dan Thorbecke dalam penelitiannya (Atmojo 2017) bahwa gini ratio yaitu suatu ukuran pemerataan yang diukur dengan membandingkan luas yang dibentuk antara diagonal dan Kurva Lorenz (distribusi pendapatan) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal.

Daimon dan Thorbecke (1995:5) juga berpendapat bahwa dalam penurunan ketimpangan atau perbaikan distribusi pendapatan selalu menimbulkan masalah, alasannya yaitu karena disaat melakukan penurunan ketimpangan selalu diikuti dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari dari masalah tersebut, yaitu sebagai berikut :

- 1) Variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis.

- 2) Persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator dalam ketimpangan.

Gini ratio merupakan ukuran dalam ketidakmerataan atau ketimpangan agregat secara keseluruhan yang angkanya berkisar dari nol (pemerataan sempurna) hingga angka satu (ketimpangan yang sempurna), dimana seluruh penduduk terpusat di wilayah tertentu. Intinya semakin besar nilai rasio gini maka semakin besar pula kemungkinan ketidakmerataan antara distribusi penduduk dengan jumlah lokasi begitupun dengan sebaliknya. Maka dari itu, dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu. Terdapat juga tabel dibawah ini yang merupakan tabel untuk mengetahui patokan dari nilai koefisien gini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Patokan Nilai Koefisien Gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,4 – 0,5	Tingkat Ketimpangan Sedang
> 0,5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Sumber : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per. 25/MEN/IX/2009, data diolah

Adapun perhitungan secara matematis tentang bagaimana perhitungan tingkat Gini Rasio dengan rumus, yaitu sebagai berikut :

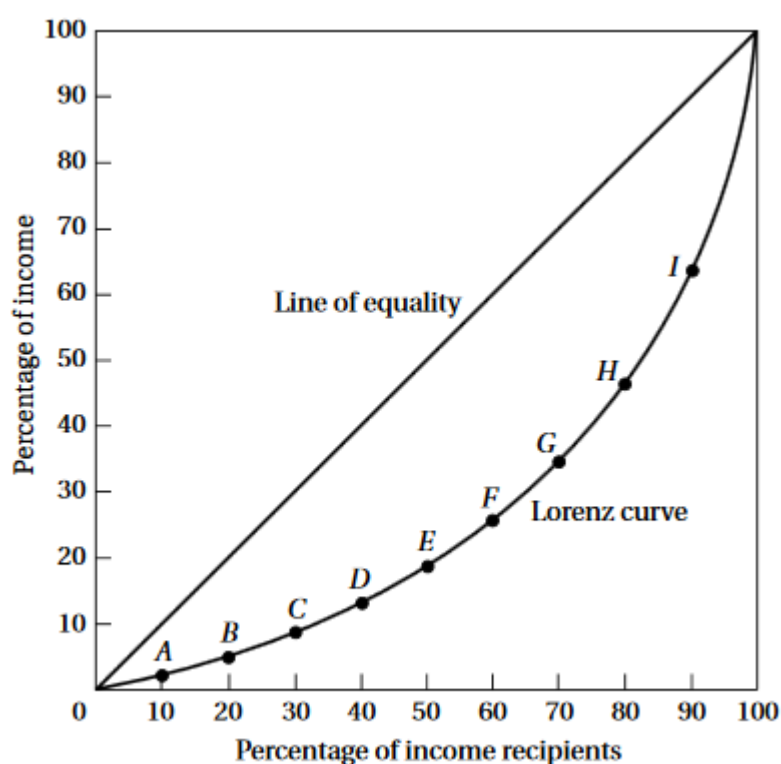
$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Dimana,

f_i : jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i .

Y_i : jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas i .

GR : nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu.



Sumber : (Todaro dan S.C 2011)

Gambar 2. 2
Kurva Lorenz

Gambar 2.2 diatas merupakan kurva lorenz yang pengertiannya adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi pendapatan dan distribusi jumlah penduduk dalam mengukur ketidakmerataan dalam pembagian kekayaan atau pendapatan. Dalam gambar 2.2 dibawah ini maka dijelaskan bahwa semakin

jauh jarak antara Kurva Lorenz terhadap garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna), maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Sebaliknya ketika jarak kurva Lorenz terhadap garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna) dekat maka distribusi pendapatannya merata.

3. Jumlah Penduduk

Pada umumnya di Indonesia perkembangan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Masalah dalam pertumbuhan jumlah penduduk bukan hanya dalam masalah jumlah tetapi juga menyangkut dalam pembangunan serta kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Peningkatan jumlah penduduk memiliki dua pandangan dalam konteks pembangunan, yaitu : a) menganggap bahwa pertambahan jumlah penduduk akan menghambat pembangunan; b) adapula yang menganggap bahwa penambahan jumlah penduduk akan memacu suatu pembangunan. (Zakaria 2017)

Menurut Badan Pusat Statistik dalam tulisannya Purnamasari (2015) bahwa penduduk merupakan unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Selain itu, konsumsi dari penduduk akan menciptakan permintaan agregat yang memicu kegiatan produksi.

Penduduk dapat diartikan sebagai seluruh orang yang menempati suatu daerah atau negara. Banyaknya orang yang menempati suatu daerah atau negara

akan menentukan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk biasanya diukur dengan jumlah penduduk per kilometer persegi.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS (Badan Pusat Statistik) adalah metode geometrik. (Statistik 2010)

Rumus laju pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut :

$$r = P \left(\frac{Pt}{P0} \right)^{1/t} - 1$$

Metode geometrik

r : Laju pertumbuhan penduduk

Pt : Jumlah penduduk tahun t

P0 : Jumlah penduduk tahun awal

T : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Interprestasi dari hasil rumusan diatas adalah sebagai berikut :

- a) Ketika $LPP > 0$ berarti terjadi penambahan penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- b) $LPP = 0$ berarti tidak terjadiperubahan jumlah penduduk padatahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. $Pt,0 < 100$ berarti terjadi

pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. Anggaran Pemerintah Daerah Bidang Belanja Kesehatan

Pemerintah dalam hal belanja daerah memiliki berbagai macam peran dalam perekonomian. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah, menurut Guritno dalam penelitiannya (Basuki dan Saptutyingsih 2016) yaitu :

- 1) Peran Stabilisasi, Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga supaya perekonomian berjalan normal dan menjaga supaya permasalahan yang terjadi dalam satu sektor perekonomian tidak merambat ke sektor lainnya.
- 2) Peran Distribusi, Pemerintah harus dapat membuat kebijakan-kebijakan supaya alokasi sumber daya ekonomi dapat dilaksanakan secara efisien dan suatu negara dapat terdistribusi dengan baik dalam masyarakat.
- 3) Peran Alokasi, Dapat disadari bahwa sumber daya alam yang suatu negara miliki itu jumlahnya sangat terbatas. Maka pemerintah harus dapat menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki agar digunakan untuk barang-barang publik, dan seberapa besar pengaruhnya yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang-barang individu. Pemerintah harus bijak dalam menentukan dari barang-barang publik yang dipergunakan untuk rakyatnya, seberapa besar yang seharusnya disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh perusahaan atau rumah tangga.

Adapun Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Selain peran tiga peran utama diatas, pemerintah juga memiliki peran untuk mewujudkan pembangunan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal tersebut terdapat juga instrumen pengalokasian dana melalui APBN atau APBD yang berkaitan dengan fasilitas publik salah satunya kesehatan. Pengalokasian dana terhadap sektor kesehatan menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, karena sektor kesehatan merupakan modal yang sangat penting bagi manusia. Kesehatan akan menunjang aktifitas yang dilakukan oleh manusia, dan apabila sektor kesehatannya buruk maka semua aktifitas yang dilakukan oleh manusia akan terhambat dan tidak efektif (Budiono, Yusuf dan Pusparini 2003)

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di bidang kesehatan. Pengeluaran kesehatan dibidang kesehatan diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas SDM dan produktivitas masyarakat. Pembangunan kesehatan dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (Patta, 2011 : 6).

5. Anggaran Pemerintah Bidang Belanja Pendidikan

Menurut (Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga 2000) ada dua biaya pendidikan, yaitu; biaya-biaya pendidikan individual dan biaya-biaya pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan langsung individual ini yang kemudian berkenaan langsung pada pendapatan per kapita masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PPU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sektor pendidikan menjadi aspek yang penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang telah dikembangkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP). Dalam komposisinya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), aspek pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu :

1) Angka Melek Huruf (AMH)

Penduduk usia 15 tahun keatas (melek huruf diukur melalui kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya)

2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah dihitung dengan tiga variabel, yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/atau pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Sektor pendidikan tidak hanya akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta menguasai teknologi, akan tetapi dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu maka investasi dalam bidang pendidikan bukan berarti hanya berguna bagi perorangan saja, melainkan bagi komunitas bisnis dan masyarakat secara umum. Pencapaian dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan pendidikan akan dapat meningkatkan pendapatan dan produktivitas. Pendidikan juga adalah jalan menuju kemajuan dan pencapaian atas kesejahteraan sosial dan ekonomi. (Latifah 2018)

6. Hubungan Antar Variabel

6.1. Hubungan Antara Rasio Gini Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Ratio Gini merupakan alat untuk mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Dengan begitu semakin meratanya jumlah penghasilan dan kekayaan pengaruhnya akan menyebabkan naiknya tingkat kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Begitu pula sebaliknya semakin tidak meratanya pendapatan dan kekayaan di Jawa Timur

akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. (Irjaya 2017).

Terjadinya kesenjangan pendapatan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah ketidakmerataan distribusi pendapatan mempunyai pengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan akhirnya akan berdampak buruk juga pada pembangunan manusia suatu daerah (Alesina dan Rodrik 1994)

6.2. Hubungan Antara Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tingginya jumlah penduduk dapat mengakibatkan masalah yang cukup serius yang pencapaiannya sampai saat sekarang belum mampu untuk terselesaikan di oleh negara manapun, karena pada dasarnya masalah tingginya jumlah penduduk terutama pada penduduk miskin akan berakibat kepada kemampuan masyarakat untuk daya beli yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga kebutuhan yang lainnya seperti dalam bidang pendidikan dan bidang kesehatan dapat terabaikan karena minimnya pendapatan (Adelfina dan Jember 2016).

Menurut Todaro dan Smith mengungkapkan bahwa penduduk merupakan pemacu untuk pembangunan karena tingkat populasi yang lebih besar sebenarnya akan berpengaruh terhadap pasar potensial yang menjadi sumber permintaan terhadap berbagai jenis macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan atau aktivitas ekonomi sehingga dapat

menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak.

6.3. Hubungan Antara Belanja Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah diharapkan memberikan kesehatan masyarakat yang baik dan memberikan kehidupan yang lebih baik dan lebih produktif. Kesehatan juga dipakai sebagai ukuran kesejahteraan seseorang. Kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (Latifah 2018).

Pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yaitu menyatakan melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. (Todaro, M.P, Smith S.C 2006) menyatakan Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

6.4. Hubungan Antara Belanja Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam teori disebutkan hubungan antara pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia adalah semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia. Pendidikan yang baik akan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental. Pendidikan sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin terjadi. (Latifah 2018)

Wahid (2012) mengatakan investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Pengeluaran pembangunan dalam sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya tentang Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan di Jawa Barat maupun diluar daerah Jawa Barat, yaitu sebagai berikut :

1. Karina Gama Soleha telah melakukan penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan *Vector Error Correction Model* (VECM). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (PPBK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP) berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya optimalisasi dalam penggunaan anggaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP), variabel Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM, variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki hubungan negatif signifikan terhadap IPM, dengan meningkatnya PMDN maka pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan.
2. Agus Tri Basuki dan Endah Saptutyingsih telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) di D.I. Yogyakarta Tahun 2008-2014. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Untuk Fasilitas Umum, Rasio Gini, dan Jumlah Penduduk Miskin. Metode penelitian dalam penelitian tersebut menggunakan Data Panel. Hasil penelitian penelitian tersebut menyatakan bahwa sebagian besar variabel bebas mempengaruhi indek pembangunan manusia kecuali pendapatan perkapita yang tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini karena kenaikan rata-rata pendapatan perkapita belum bisa mendorong kenaikan perkapita, dengan kata lain kenaikan pendapatan perkapita belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

3. Rustariyuni telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012. Metode penelitian dalam penelitian tersebut menggunakan variabel gini ratio, pengeluaran non makanan per kapita, belanja daerah dan laju pertumbuhan ekonomi di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan periode waktu 9 tahun. Hasil penelitian tersebut bahwa variabel gini ratio, variabel pengeluaran non makanan per kapita, variabel belanja daerah dan variabel laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2004-2012.

4. Adelfina Nedo dan I Made Jember telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 – 2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah. Metode penelitian tersebut menggunakan penelitian data panel. Hasil penelitian tersebut menyatakan secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali periode 2005-2013, secara parsial variabel kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Bali periode 2005-2013, secara parsial variabel Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali periode 2005-2013.
5. Nurhikmah Amalia Hasan telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kemiskinan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di D.I Yogyakarta periode 2008-2014. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kemiskinan dan Belanja Modal. Metode penelitian dalam penelitian tersebut yaitu Data Panel. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan belanja modal

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

6. Rizaldi Zakaria telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal. Metode penelitian dalam penelitian tersebut yaitu Data Panel. Hasil penelitian tersebut yaitu variabel Tingkat Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, variabel Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, variabel Tingkat Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel Tingkat Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Dwi Atmojo melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2014. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk Miskin, dan Gini Ratio. Metode penelitian dalam penelitian tersebut yaitu data panel. Hasil penelitian tersebut menyatakan PDRB dan Gini Ratio memiliki pengaruh positif signifikan terhadap

Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Tingkat Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

8. Muliza Muliza, Teuku Zulham, dan Chenny Seftarita melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Aceh. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB. Metode Penelitian dalam penelitian tersebut menggunakan Data Panel. Hasil penelitian tersebut menyatakan variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
9. Gusi Bagus Kompiang, Putra Setiawan, dan Dewa Nyoman Budiana melakukan penelitian tentang Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Belanja modal melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Metode penelitian dalam penelitian tersebut menggunakan analisis jalur/Part Analisis. Hasil penelitian tersebut menyatakan Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Belanja modal berpengaruh secara tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui mediasi pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil z hitung 4,35 lebih besar dibandingkan z tabel 1,96. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi.

10. Willman Fogati Zebua melakukan penelitian tentang Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi pada Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2013). Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Metode penelitian dalam penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menyatakan Belanja modal dan belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2013, Belanja hibah dan belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2013.

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan di Indonesia	Karina Gama Soleha	Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).	<i>Vector Error Correction Model</i> (VECM)	variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (PPBK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP) berpengaruh negatif dan signifikan. Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM, variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki hubungan negatif signifikan terhadap IPM,
2	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di D.I. Yogyakarta Tahun 2008-2014	Agus Tri Basuki dan Endah Saptutyningasih	Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Untuk Fasilitas Umum, Rasio Gini, dan Jumlah Penduduk Miskin.	Data Panel	Sebagian besar variabel bebas mempengaruhi indeks pembangunan manusia kecuali pendapatan perkapita yang tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3	Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Indeks Pembangunan Manusia	Rustariyuni	Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi	Data Panel	Variabel gini ratio, variabel pengeluaran non makanan per kapita, variabel belanja daerah dan variabel laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2004-2012.

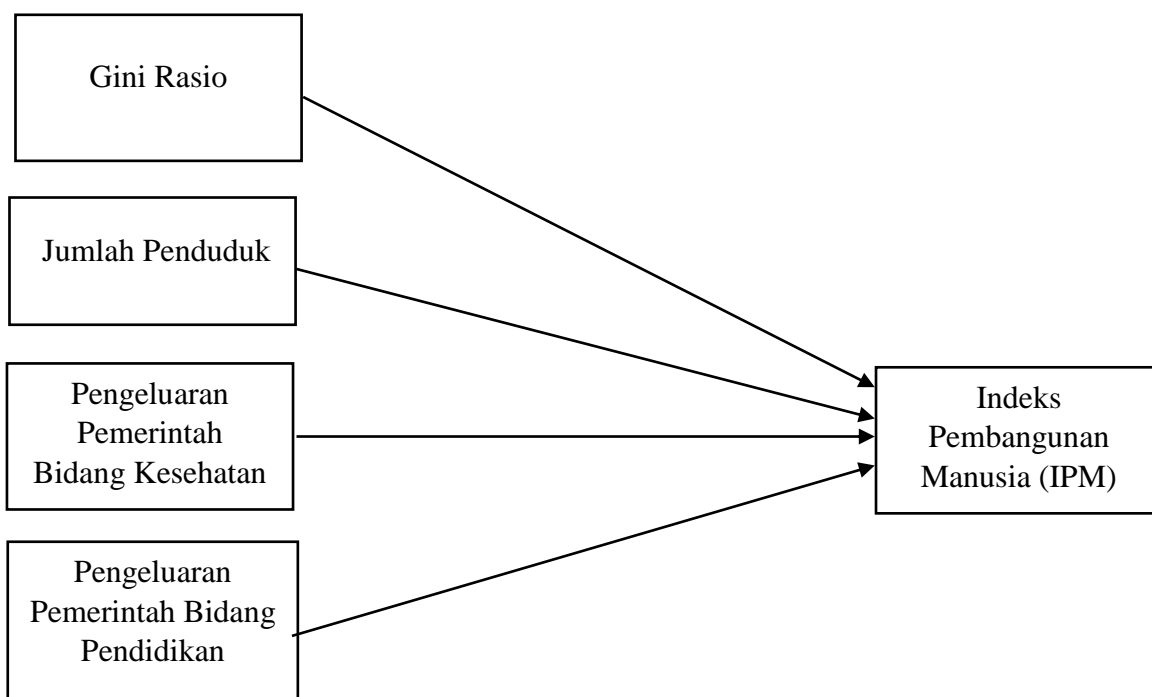
	Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012.				
4	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005-2013	Adelfina dan I Made Jember	Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah	Data Panel	Secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali periode 2005-2013, secara parsial variabel kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Bali periode 2005-2013, secara parsial variabel Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali periode 2005-2013.
5	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kemiskinan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di D.I Yogyakarta periode 2008-2014	Nurhikmah Amalia Hasan	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kemiskinan dan Belanja Modal.	Data Panel	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
6	Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah	Rizaldi Zakaria	Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal	Data Panel	Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, variabel Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, variabel Tingkat Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel Tingkat Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi

	Tahun 2010-2016				Jawa Tengah.
7	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2014	Dwi Atmojo	Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk Miskin, dan Gini Ratio	Data Panel	PDRB dan Gini Ratio memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Tingkat Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
8	Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Aceh	Muliza Muliza, Teuku Zulham, dan Chenny Seftarita	Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB.	Data Panel	Variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
9	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali.	Gusi Bagus KOMPIANG, Putra Setiawan, dan Dewa Nyoman Budiana	Belanja modal melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.	Analisis Jalur/ <i>Part analysis</i>	Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, Belanja modal berpengaruh secara tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui mediasi pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil z hitung 4,35 lebih besar dibandingkan z tabel 1,96. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi.
10	Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas	Willman Fogati Zebua	Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial	Analisis Regresi Linier Berganda	Belanja modal dan belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2013, Belanja hibah dan belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat tahun

	Pembangunan Manusia (Studi pada Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2013).				2011-2013.
--	---	--	--	--	------------

C. Kerangka Berpikir

Untuk dapat menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat, kita dapat mengetahui beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu Gini Rasio, Jumlah penduduk, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan. Secara Skema dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 3
Skema Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dengan Variabel yang Mempengaruhinya

D. Hipotesis

Menurut (Muri Yusuf 2005) definisi hipotesis penelitian adalah kesimpulan sementara yang belum final atau suatu jawaban yang sifatnya sementara dan merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan

hubungan antara dua variabel atau lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan dengan cara penyelidikan ilmiah.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara Variabel X dan Variabel Y, dimana Variabel nol (H_0) yaitu suatu hipotesis yang tidak adanya hubungannya, umumnya diformalisasikan untuk ditolak. Sedangkan Variabel Alternative (H_a) yaitu suatu hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini, dengan begitu masing-masing hipotesis dijabarkan dengan sebagai berikut :

- H1 : Diduga variabel Gini Rasio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- H2 : Diduga variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- H3 : Diduga variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- H4 : Diduga variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).